

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Filsuf renaissance Niccolo Machiavelli, merupakan tokoh kunci di masa transisi, berhasil mengeser pemikiran dari teori politik tradisional Italia pada abad pertengahan. Machiavelli tidak mempertanyakan tentang dasar teori politik itu, melainkan ia melihat realitas dan pengalaman kontemporer untuk memperoleh gagasan-gagasan praktis yang dianggapnya berguna bagi negara dan penguasa yang mengandalkan pemerintahan pada saat kondisi bangsa Italia yang sedang dilanda kekacauan dan menjadi mangsa “bangsa bar-bar” yang ingin menguasai Italia. Machiavelli menegaskan bahwa dalam keadaan darurat sebagaimana yang sedang dialami oleh Italia pada masa itu, kekuasaan dan negara yang begitu goyah dan rapuh harus distabilkan agar dapat menjadi sarana politik yang mampu membebaskan bangsa Italia dari “bangsa bar-bar” yang merebut hak dan martabat rakyat Italia.

Konsep teori kekuasaan politik Machiavelli bertolak dari realitas kekuasaan yang terjadi pada bangsa Roma dizaman renaissance. Sumber kekuasaan bagi Machiavelli bersumber dari negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Menurut Machiavelli kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada Kebajikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Pemikiran Machiavelli tentang politik tanpa moralitas dirampungkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada penguasa Italia saat itu Lorenzo de’Medici. Dengan tujuan agar Lorenzo menjadi seorang penguasa yang tangguh, kuat, dan mampu meneruskan cita-citanya yaitu untuk membebaskan bangsa Italia dari penindasan bangsa-bangsa lain.

Machiavelli memahami kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa diperbolehkan berbohong, menipu dan menindas. Pandangan Machiavelli ini bukan dilihat sebagai nasihat politik,

melainkan sebagai suatu sifat kekuasaan yang dikendalikan oleh seorang penguasa tidak semurni dunia surgawi. Sebagaimana situasi pada abad pertengahan dan zaman pra renaissance. Dalam pandangannya kekuasaan merupakan dunia yang penuh intrik, kekejian dan kehampaan. Kekuasaan yang mempraktikkan prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan sikap ini, penguasa berhak melanggar hak-hak rakyatnya yang dianggap menghalanginya dalam proses untuk mencapai tujuannya itu.

Mereka yang berkuasa dan menjaga kemerdekaan hal memenuhi dua hal utama: *Pertama*, mereka yang dapat mewujudkan ambisi mereka, dan karena mereka memiliki peran lebih besar dalam republik dengan memegang kekuasaan ditangan mereka, maka mereka lebih memiliki cukup alasan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan itu. *Kedua*, mereka mencegah pikiran-pikiran rakyat untuk gelisah karena menginginkan kekuasaan, sebuah penyebab yang dapat menimbulkan konflik dan skandal tanpa batas dalam republik, seperti mendorong kaum bangsawan menuju beberapa jenis tindakan putus asa yang selanjutnya akan menghasilkan efek-efek buruk.

Dewasa ini, praktik politik di Indonesia dapat dikatakan menerapkan konsep kekuasaan yang digagas oleh Machiavelli diantaranya *pertama*, penggunaan kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan dan otoritas sering digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Misalnya, pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto menggunakan propaganda dan manipulasi informan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenangkan dukungan rakyat. *Kedua*, penggunaan kekerasan dan intimidasi. Dalam beberapa kasus, kekerasan dan intimidasi digunakan oleh pemerintah atau elit politik untuk mempertahankan kekuasaan atau menekan oposisi. *Ketiga*, mengabaikan peran moralitas dalam politik. Dalam konteks Indonesia, penguasa cenderung mengabaikan sikap dan nilai moral dalam mengambil suatu keputusan seperti KKN dan politik dinasti. Pada dasarnya sikap moral dapat berperan penting dalam politik sehingga dapat diterapkan dengan memahami bagaimana moralitas digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan dukungan rakyat.

Akan tetapi di satu sisi, Machiavelli membantu para penguasa di Indonesia untuk memahami bahwa moralitas tidak selalu menjadi prioritas dalam politik, dan bahwa kepentingan negara dapat menjadi lebih penting daripada moral individu. Sehingga dengan mengutamakan moralitas dan kepentingan bersama, KKN dan segala bentuk praktik politik yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dan diminimalisir dan terciptanya kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, penulis sampai pada sebuah Kesimpulan bahwa politik tanpa moralitas Machiavelli ini sebenarnya bersumber pada suatu kepentingan negara dan tindakan untuk mengamankan kekuasaan. Politik seperti ini meskipun tidak ada di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, namun sikap politik seperti ini sesungguhnya adalah tindakan yang benar dan realistis sesuai dengan kebutuhan negara dan kekuasaan. Tanpa tindakan politik seperti ini, negara yang sedang mengalami ketidakstabilan kekuasaan seperti Italia pada zaman itu, bisa saja mengalami kejatuhan dan kehancuran.

5.2 Saran

5.2.1. Bagi pemerintah.

Menurut Penulis, pemerintah dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi politik yang adil (demokratis) terhadap warga negara. Pemerintah disarankan untuk mengadopsi prinsip efektivitas kepemimpinan Niccolo Machiavelli dengan tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kekuasaan. Strategi pragmatis yang digagas oleh Machiavelli dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas politik dan pengambilan keputusan politik yang cepat, namun harus diseimbangkan dengan nilai-nilai moral untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Situasi politik yang demokratis dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan tugas sebagai penguasa dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam artian bahwa, pemerintah harus menjalankan kebijakan-kebijakan seperti mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam mengambil keputusan dan pengelolaan sumber daya negara. Serta mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sikap adil para penguasa harus mampu mengambil kebijakan yang didasari pada kesejahteraan umum untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera yang berlandas pada Pancasila sebagai dasar negara.

5.2.2. Bagi tokoh Agama

Para tokoh agama disarankan untuk mengambil peran aktif dalam mengadvokasi nilai-nilai moral dan etika dalam kepemimpinan politik, serta menjadi suara kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Mengingat pandangan Niccolò Machiavelli yang cenderung pragmatis, para tokoh agama dapat menyeimbangkannya dengan memperjuangkan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam pemerintahan. Dengan memberikan edukasi dan panduan spiritual kepada para pemimpin dan masyarakat, tokoh agama dapat membantu membangun budaya politik yang lebih berintegritas dan bermoral, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum.

5.2.3. Bagi masyarakat.

Masyarakat disarankan untuk aktif berperan dalam mengawasi dan mengkritisi praktik kekuasaan politik yang ada, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran. Pendidikan politik yang baik sangat diperlukan agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan mampu mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, masyarakat harus berani menyuarakan aspirasi mereka melalui mekanisme yang legal dan damai, seperti partisipasi dalam diskusi publik, pemilu, serta kegiatan advokasi. Dengan menjadi bagian dari proses politik yang demokratis, masyarakat dapat mendorong pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan umum, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfian. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Afala Machadani, La Ode. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press, 2020.
- Baghi, Felix., (ed), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Buchori, Mochtar., ddk., *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Budi Kleden, Paul. *Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Penerbit Gramedia Utama, 2007.
- Djiwandono, J Soedjati. *Gereja dan Politik Dari Orde Baru ke Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.
- Dasion Raja.,dkk., *Tiga Diskursus Kuasa dalam Sosiologi: Max Weber, Karl Max, & Michael Foucoult*. Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka Anggota IKAPPI, 2021.
- Emmerson, Donald K. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2001.
- Eryanto, *Kekuasaan Otoriter; Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: Penerbit INSIST, 2000.
- Fa'izia, Khilya., dan Suparyanto, Yudi. *Kekuasaan dan Politik Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Fek, Mikhael., dkk., *Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004.

- Haboddin, Muhtar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: Penerbit UB Press, 2017.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi dan sentimentalitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2013.
- _____. *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012.
- Hidayat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Penerbit SETARA, 2009.
- Jayanto Dwi, Dian. *Filsafat Politik Niccolo Machiavelli*. Yogyakarta: Percetakan Diandra, 2022.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Penerbit Obor, 2017.
- Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawian Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Maarif, Ahmad Syafii., dkk, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
- Machiavelli, Niccolo. *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli (Discorsi)*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.
- _____. *Sang Pangeran*. Penerj. Noviatrri. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2014.
- _____. *History of Florence*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Book Jungle, 2007.
- _____. *Sang Penguasa*. Penerj. Woekirsari. Jakarta: Penerbit Gramedia Pusataka Utama, 1991.
- Maksudi. Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada, 2017.
- Maschab, Mashuri. *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983.
- Morrison, Wayne. *Yurisprudensi: Thomas Hobbes dan Asal mula Teori Hukum Imperatif*. Banten: Penerbit Nusamedia, 2021.
- Natsir, M. *Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2005.

- Noviatri. (Pengantar) dalam Niccolo Machiavelli, *Sang Pangeran*. Jakarta: Penerbit Alax Media Komputindo, 2010.
- Pribadi, Toto., Muhyidin, Ali., dan Susanti. *Pendekatan Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka 2018.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1984.
- Rais, M. Amien. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. Cet. ke-2. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1988.
- _____. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Penerbit Cv. Rajawali, 1988.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, dalam Amein Rais, *Korupsi, Korupsi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Rozi, Syahfuan., dkk, *politik Identitas Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus KeIndonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2019.
- Said, Haji Salim. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Bandung: Penerbit Mizan, 2016.
- Strong, C.F. *Konstitusi Politik Modern Lembaga Legislatif*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021.
- Sucipto, Surjawanto. *Demokrasi Liberal 1950-1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959-1966*. Pontianak Selatan: Penerbit Dermawati Pres, 2018.
- Sugiaryo. *Konstitusi dan Pergeseran Kekuasaan Legislatif*. Surakarta: Penerbit Unisri Press, 2020.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2002.
- Sukarna. *Sistem Politik Indonesia II*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.
- Suparman. *Sistem Pemerintahan*. Jakarta Timur: Penerbit PT. Balai Pustaka, 2012.
- Suprihatini, Amin. *Sistem Kekuasaan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.

Wattimena, Reza A. *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Pembaharuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani manusia di Balik Korupsi*. Penerbit Kanisius, 2012.

Wiranggani, Panjalu *Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit IKAPI, 2017.

Winaryo, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit MedPress, 2007.

Zainudin, A. Rahman. *Kekuasaan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1999.

KAMUS, WIKIPEWDIA

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002.

Wikipedia. “Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” dalam *Wikipedia*, 2015.

Wikipedia. “Sejarah Politik Indonesia Era Reformasi” dalam *Wikipedia*, 2024.

SKRIPSI

Parera Indra, Emilianus.” Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan bagi Sistem Demokrasi di Indonesia” (*Skripsi Sarjana*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2023.

JURNAL

Damar, Ario. “Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (*Petty Corruption*) Pada Sektor Pelayanan Publik di Indonesia”. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5:2 (2023): 407-417.

Djani, Luky., dan Vermonte, Philips J. “*Vote Buying* di Indonesia; Motif, Modus dan Pola”. *Journals Analisis CSIS*, 42:3 (2013): 380-390.

Febryana, Diyah., dkk., “Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia”. *Jurnal Gema Keadilan*, 9:3 (2022): 174-185.

Gunanto, Djoni. “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia” *Jurnal Administrasi Negara*, 8:2 (2020): 177-191.

Habibi, Muhammad. “Analisis Politik Identitas Indonesia”, *Jurnal Universitas Mulawarman*, 8:2 (2017): 1-22.

- Jojo Juhaini. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Istigomah*, 3:1 (2021): 41-48.
- Jhosella, Patricia. “Gaya Komunikasi Jokowi Dalam Program Kartu Indonesia Pintar”. *Jurnal Nasional*, 12:2 (2018): 815-827.
- Ka’bah, Rifyai. “Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37:1 (2007): 73-86
- Nizar, Moh., dan Alqarni, Wais. *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Aceh: *Jurnal Syiah Kuala University Press*, (2021): 47-59.
- Noak, Piers Andreas. “Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penangkalannya: Studi Kasus di Kabupaten Tabanan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10:2 (2021): 416-430.
- Nur, Ilham., dan Arjuan, H. Hendra. “Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1:4 (2024): 279-292.
- Puspitasari, Sri Hastuti. “Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan—Tujuan Negara”. *Jurnal Hukum*, 18:8 (2001): 30-45.
- Sherberg, Michael. “Problematika Membaca dalam “Discourses” Machiavelli”. Penerj. *Chicago Journals*. Washigton University: (1991): 168-182.
- Saputro, Agus. “Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019”, dalam, *Asketik UIN Sunan Kalijaga*, 2:2 (2018): 117-130.
- Sugiaryo., dan Murti S, Wibowo. “Pergeseran Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Amandemen UUD Negara RI 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 1: 2 (2024): 105-117.
- Salsabila, Nurul Syifa dkk., “Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1:1 (2013): 1-25.
- Sjafrina Putri, Almas Ghaliya. “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik”. *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, 5:1 (2022): 43-53.

Simamora Valentina, Sri Devi., dan Raharjo, Tunormo. “Isu Identitas Etnis dan Agama dalam Konteks Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018)”. *Jurnal Interaksi Online*, 7:4 (2019): 317-329.

Susanti, Martien Herna. “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”. *Journal of Government and Civil Society*, 1:2 (2017): 111-119.

Takbir, Muhammad. “Refleksi Filsafat Pancasila Terhadap Praktik Korupsi di Indonesia”. *Jurnal UIN Alauddin*, 16:2 (2022): 111-123.

INTERNET

Annisa. *Republik Indonesia Serikat: Sejarah dan Tujuannya*, (Fakultas Hukum, 1 Juli 2024), <https://fahum.umsu.ac.id/republik-indonesia-serikat-sejarah-dan-tujuannya/>. Diakses 8 Oktober 2024.

Caesar Isabela, Monica Ayu. “*Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik*”, Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000011/kapabilitas-ekstraktif-dalam-sistem-politik>. Diakses 8 Oktober 2024.

Candra, Septa. *Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu*”, dalam *Republika, Universitas Muhammadiyah Jakarta*, <https://umj.ac/opini-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. Diakses 13 Januari, 2025.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Relasi Antara Agama dan Politik*. Surabaya: Departemen Politik, 2022). <https://politik.fisip.unair.ac.id/en/relasi-antara-agama-dan-politik/>. Diakses pada 4 September 2024.

Hardiantoro, Alinda. “Rincian Perhitungan Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung “, dalam *Kompas. Com*, <https://kmp.im/plus3Download>. Diakses 10 Januari 2025.

Info Hukum, “Nepotisme: Pengertian, Jenis, Penyebab dan Dampaknya”, dalam *Bloomnews*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/nepotisme-pengertian-jenispenyebab-dan-dampaknya/>. Diakses 20 Januari 2025.

Mangunwijaya, Y. B. *Menuju Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1999.

Mansfield, Harvey. “Discourses on Livy by Machiavelli,” editors by Encyclopedia Britannica. Penerj, September 11, 2024,

<https://www.britannica.com/biography/Niccolo-Machiavelli/The-Discourses-on-Livy>. Diakses pada 7 September 2024.

Mukaromah, Vina Fadhotul. *Batavia Mengganti Nama Jadi Jakarta*. Kompas. Com. Diakses 8 Oktober 2024.

Nurfadilah, Ahmad Nanang. *Konflik Ambon 1999: Manusia yang Beragama dan Dialog Antar Umat Beragama*. <https://m/konflik-ambon-1999-manusia-yang-beragama-dan-dialog-antar-umat-beragama>. Diakses pada 5, September 2024.

Putri Mulia, Vanya Karunia. (ed), “Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan”, dalam *Kompas*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/16/130000469/perkembangan6-politik-pada-awal-kemerdekaan>. Diakses 14 Oktober 2024.

Pratomo, Muhammad Wildan. “Regenerasi Jadi Keharusan, Apri: Integritas dan Etika Berpolitik Kunci Dasarnya”, dalam *Radio Republik Indonesia*, <https://WWW.rri.co.id/bandung/pemilu/415674/regenerasi-jadi-keharusan-apri-intergritas-dan-etika-berpolitik-kunci-dasarnya>. Diakses 14 Januari 2025.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Mengenai Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20230111-mengenai-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>. Diakses 10 Januari 2025.

Retaduari, Elza Astari. “Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto”, dalam *Kompas. Com*, <https://kmp.im/plus3>. Diakses 10 Januari, 2025.

Suri. “Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959,” <https://media.neliti.com/media/publication/2006618-none.pdf>. Diakses 21 Oktober 2024.

Umum Setda, “Admin Sistem Pemerintahan Indonesia”. Mei 09, 2023, <https://umumsetda.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>, diakses pada 1 maret 2024. <https://id.m.Wikipedia.org/Wiki/Majelis-Permusyawaratan-Rakyat-Republik-Indonesia>. Diakses 7 November 2024.